

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Review hasil penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk melakukan perbandingan dan dijadikan referensi untuk penelitian yang sejenis. Review ini juga dapat membantu peneliti untuk mengetahui jawaban atas permasalahan yang telah dikaji oleh peneliti terdahulu dan memberikan gambaran dalam pelaksanaan penelitiannya.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian yang dapat digunakan sebagai referensi, antara lain penelitian oleh Falatah (2018) menggunakan metode statistik deskriptif, uji linier sederhana, dan uji linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa a) Kompetensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, dengan demikian semakin tinggi kompetensi auditor maka akan semakin tinggi pula kualitas audit. b) Independensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, dengan demikian semakin tinggi independensi auditor maka semakin tinggi pula kualitas audit. c) Moral Reasoning auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, dengan demikian semakin tinggi Moral Reasoning maka semakin tinggi pula kualitas audit. d) Kompetensi, Independensi, dan Moral Reasoning auditor secara bersama-sama (simultan) memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Kekurangan dari penelitian ini terletak pada bagian pendahuluan, karena pada bagian ini tidak dipisah antara pendahuluan dan teori yang digunakan dalam penelitian tersebut. Baiknya kedua bagian tersebut dipisah agar mempermudah pembaca atau pengguna yang menggunakan jurnal tersebut sebagai referensi.

Kemudian penelitian oleh Giovani dan Rosyada (2019) menggunakan metode statistik deskriptif, uji validitas, uji reabilitas, uji regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kompetensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit dan independensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Kekurangan dari penelitian ini adalah tidak menambah

variabel di luar variabel yang diteliti, misalnya gender, umur, tingkat responden, dan sebagainya.

Penelitian oleh Vidyantari dan Suputra (2018) menggunakan metode uji validitas, uji reliabilitas, asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas), analisis regresi moderasi/ moderated regression analysis (MRA), koefisien determinasi (R^2), uji kelayakan model (uji f), dan uji hipotesis (uji t). Penelitian ini menunjukkan bahwa a) Due Professional Care berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas audit, b) Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, c) Kecerdasan Emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, dan d) Reward memperkuat pengaruh due professional care, akuntabilitas, dan kecerdasan emosional pada kualitas audit dari auditor di KAP Provinsi Bali. Kekurangan dari penelitian ini adalah tidak memisah bagian pendahuluan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Sebaiknya pada bagian ini dilakukan pemisahan agar mempermudah pembaca dan pengguna jurnal ini untuk dijadikan referensi.

Penelitian oleh Kurniawansyah (2017) menggunakan metode pengujian hipotesisnya dengan uji regresi linier berganda, uji koefisien determinasi simultan, uji F , dan uji t . Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan berpengaruh positif terhadap kualitas audit, jumlah klien berpengaruh positif terhadap kualitas audit, peer review berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dan profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Keterbatasan dari penelitian ini adalah sampel penelitian hanya auditor yang berada di wilayah Jawa Timur sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisir untuk mewakili seluruh Indonesia.

Penelitian oleh Kusuma dan Sukirman (2017) dengan pengujian hipotesis menggunakan uji R , uji t , dan uji MRA. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kecerdasan emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, pengalaman auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap hubungan antara kecerdasan emosional dan kualitas audit, dan independensi berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengalaman auditor dan kualitas audit. Kekurangan dari penelitian ini adalah tidak memisah bagian pendahuluan dengan teori yang

digunakan dalam penelitian ini. Sebaiknya pada bagian ini dilakukan pemisahan agar mempermudah pembaca dan pengguna jurnal ini untuk dijadikan referensi.

Penelitian oleh Nainggolan (2016) menggunakan teknik pengujian asumsi klasik (pengujian normalitas, pengujian multikolinearitas, dan pengujian heteroskedastisitas), analisis regresi berganda, pengujian hipotesis secara parsial (uji T) dan secara simultan (uji F) dan pengujian hipotesis dengan variabel moderasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa a) secara parsial akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, b) secara parsial objektivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, c) secara simultan akuntabilitas dan objektivitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, d) etika auditor tidak memoderasi hubungan antara akuntabilitas terhadap kualitas audit, e) etika auditor tidak memoderasi hubungan antara objektivitas terhadap kualitas audit. Kekurangan dari penelitian ini adalah menggunakan variabel moderasi yang hasilnya menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak memoderasi variabel independen.

Penelitian oleh Kartika dan Pramuka (2019) menggunakan analisis data uji statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji Regresi Linier Berganda, uji hipotesis yang terdiri dari uji t dan uji F. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil a) Tingkat kompetensi mempengaruhi kualitas audit, semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki maka auditor dapat menyelesaikan masalah yang mengindikasikan kesalahan dalam laporan keuangan secara efektif dan efisien dalam proses audit. b) Independensi mempengaruhi kualitas audit, semakin tinggi independensi auditor, semakin tinggi tingkat kualitas auditnya. c) Profesionalisme mempengaruhi kualitas audit, sehingga profesionalisme yang tinggi akan menghasilkan audit yang berkualitas tinggi. Kekurangan dari penelitian ini adalah tidak memisah bagian pendahuluan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Sebaiknya pada bagian ini dilakukan pemisahan agar mempermudah pembaca dan pengguna jurnal ini untuk dijadikan referensi.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Auditing

a. Pengertian Auditing

Menurut Arens et.al (2015), auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Menurut Sukrisno Agoes (2018), audit adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan catatan akuntansi dan bukti pendukung, dalam rangka memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa auditing adalah pemeriksaan catatan dan bukti akuntansi yang telah disusun pihak manajemen yang dilakukan oleh auditor independen dan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan, di mana laporan keuangan tersebut berperan penting bagi pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan.

Dalam melakukan audit, harus tersedia informasi dalam bentuk yang dapat diverifikasi dan beberapa standar (kriteria) yang dapat digunakan auditor untuk mengevaluasi informasi tersebut, yang dapat dan memang memiliki banyak bentuk. Kriteria yang digunakan dalam mengevaluasi biasanya adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP) atau International Financial Reporting Standards (IFRS). Untuk memenuhi tujuan audit, auditor harus memperoleh bukti audit dengan kualitas dan jumlah yang mencukupi. Bukti audit adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Auditor juga harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan

yang tepat dan auditor harus memiliki sikap mental independen, karena kompetensi auditor tidak ada nilainya apabila tidak independen dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti. Hal terakhir yang dilakukan auditor adalah menyiapkan laporan audit yang menyampaikan temuan-temuan auditor kepada pemakai.

b. Jenis Audit

Menurut Arens et.al (2015), jenis audit antara lain :

1. Audit Operasional

Audit operasional mencakup evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas setiap bagian dari prosedur dan metode kerja yang digunakan organisasi. Tujuannya adalah untuk mendukung sejauh mana keefisiensi dan keefektifan prosedur dan kinerja organisasi. Pada akhir audit operasional, auditor diharapkan memberikan saran-saran perbaikan bagi manajemen agar kinerja manajemen di masa depan dapat berjalan sesuai dengan tujuan organisasi.

Dalam audit operasional, review atau penelaahan yang dilakukan tidak terbatas pada akuntansi, tetapi dapat mencakup evaluasi atas struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran, dan semua bidang lain di mana auditor menguasainya. Dalam pengertian lain, audit operasional lebih menyerupai konsultasi manajemen karena proses pengevaluasian dilakukan secara subjektif apakah efisiensi dan efektivitas operasi sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

2. Audit Ketaatan

Audit ketaatan dilakukan karena untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah melaksanakan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh otoriter yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan ke pihak manajemen, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan

tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan.

3. Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan merupakan penilaian atau evaluasi atas suatu entitas sehingga memperoleh suatu opini audit yang independen dari pihak auditor mengenai laporan keuangan yang akurat, lengkap, relevan, dan sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan yang berlaku. Dalam menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan tersebut mengandung kesalahan yang material atau salah saji lainnya.

Dalam hal ini, suatu pendekatan terpadu pada auditing memperhitungkan baik risiko salah saji maupun pengendalian operasi yang dimaksudkan untuk mencegah salah saji. Auditor harus memahami entitas dan lingkungannya secara mendalam yang mencakup pemahaman mengenai bisnis klien, peraturan dan operasinya, serta hubungan eksternal klien seperti pemasok, pelanggan, dan kreditor. Hal ini dapat membantu auditor mengidentifikasi risiko-risiko yang berkaitan dengan strategi klien yang mungkin mempengaruhi apakah laporan keuangan disajikan secara wajar.

c. Tujuan Audit

Umumnya, tujuan dilaksanakannya audit adalah untuk menilai kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen yang mengacu pada kesesuaian terhadap prinsip akuntansi keuangan yang berlaku umum dan pemberian opini atas audit yang telah dilaksanakan. Menurut Arens et.al (2015), tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan

secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku.

Berikut tujuan audit yang umum dilakukan oleh auditor :

i) Kelengkapan (*Completeness*)

Audit bertujuan untuk menyakinkan bahwa seluruh transaksi yang sudah dicatat atau ada dalam jurnal secara aktual telah dimasukkan.

ii) Ketepatan (*Accuracy*)

Audit bertujuan untuk memastikan transaksi dan saldo perkiraan yang ada telah dicatat berdasarkan jumlah yang benar, perhitungan yang benar, diklasifikasikan, dan dicatat dengan tepat.

iii) Eksistensi (*Existence*)

Audit bertujuan untuk memastikan bahwa semua aset dan kewajiban yang sudah tercatat mempunyai eksistensi atau kejadian pada tanggal tertentu sehingga transaksi tersebut harus benar-benar terjadi dan bukan transaksi fiktif.

iv) Penilaian (*Valuation*)

Audit digunakan untuk dapat memastikan bahwa prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku telah diterapkan dengan benar.

v) Klasifikasi (*Classification*)

Audit bertujuan untuk dapat memastikan bahwa transaksi yang sudah di jurnal diklasifikasikan dengan tepat. Apabila terkait dengan saldo maka angka-angka yang akan dimasukkan didaftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat.

vi) Pisah Batas (*Cut Off*)

Audit bertujuan untuk dapat memastikan bahwa transaksi-transaksi yang dekat tanggal neraca dicatat dalam periode yang

tepat. Transaksi yang mungkin sekali salah saji adalah sebuah transaksi yang dicatat mendekati akhir suatu periode akuntansi.

vii) Pengungkapan (*Disclosure*)

Audit bertujuan untuk meyakinkan bahwa suatu saldo akun dan persyaratan pengungkapan yang berkaitan telah disajikan dengan wajar dalam suatu laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangannya.

d. Jenis Auditor

Menurut Arens et.al (2015), auditor adalah seseorang yang menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, laporan posisi keuangan dan arus kas manajemen sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Auditor dapat diklasifikasikan sesuai dengan jenis dan kegiatan audit yang dikerjakannya. Secara umum jenis auditor adalah sebagai berikut :

a. Kantor Akuntan Publik (KAP)

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah tempat para akuntan publik menjalankan tugasnya di mana Kantor Akuntan Publik (KAP) bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, namun terdapat juga perusahaan lain yang cukup besar, menengah hingga organisasi non komersil yang kecil. Kantor akuntan publik mencerminkan fakta bahwa auditor yang menyatakan pendapat audit atas laporan keuangan harus memiliki liensi sebagai akuntan publik sehingga dapat dibedakan dengan auditor internal dalam lingkup perusahaan.

b. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah adalah auditor yang melakukan audit atas lapran keuangan pada instansi-inttansi pemerintah. Auditor pemerintah dibagi menjadi auditor eksternal pemerintah dan auditor

internal pemerintah. Auditor eksternal pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan badan yang tidak tunduk kepada pemerintah sehingga diharapkan dapat bersikap independen. Auditor internal pemerintah atau disebut sebagai Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen/LPND, dan Badan Pengawasan Daerah.

c. Auditor Pajak

Auditor pajak merupakan auditor di bawah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertugas untuk melakukan audit terhadap para wajib pajak tertentu apakah telah melakukan kewajibannya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

d. Auditor Internal

Auditor internal adalah seorang auditor yang bekerja untuk suatu instansi atau perusahaan yang bertugas untuk memeriksa dokumen keuangan internal perusahaan namun dalam lingkup yang terbatas dan untuk meningkatkan akurasi data keuangan perusahaan.

2.2.2. Kualitas Audit

a. Pengertian Kualitas Audit

Kualitas audit adalah karakteristik atau gambaran praktik dan hasil audit berdasarkan standar auditing dan standar pengendalian mutu yang menjadi ukuran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesi seorang auditor. Kualitas audit berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas baik, jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu.

Dari pengertian tentang kualitas audit di atas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan probabilitas auditor untuk menemukan kesalahan yang ada pada laporan keuangan klien dan melaporkannya dalam laporan auditan. Kualitas audit perlu ditingkatkan supaya laporan keuangan yang telah diaudit diharapkan lebih berkualitas sehingga kepercayaan para pengguna laporan keuangan dan masyarakat pun meningkat.

b. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit

Menurut Riadi (2018), faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit antara lain :

a. Kompetensi

Audit dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, dalam standar umum ketiga, menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalitasnya dengan cermat dan seksama.

b. Tekanan Waktu

Dalam melakukan kegiatan audit, auditor akan menemukan adanya suatu kendala dalam menentukan waktu untuk menyerahkan hasil audit yang akurat dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Tekanan waktu yang dialami oleh auditor ini dapat berpengaruh terhadap menurunnya kualitas audit karena auditor dituntut untuk menghasilkan hasil audit yang baik dengan waktu yang telah dijanjikan dengan klien.

c. Pengalaman Kerja

Dalam pelaksanaan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai

seorang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya, yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit. Pengalaman kerja auditor adalah pengalaman yang dimiliki auditor dalam melakukan audit yang dilihat dari segi lamanya bekerja sebagai auditor dan banyaknya tugas pemeriksaan yang telah dilakukan.

d. Etika dan Independensi

Etika adalah prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindaknya seseorang sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji dan meningkatkan martabat dan kehormatan seseorang. Etika dalam audit adalah suatu prinsip untuk melakukan proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria – kriteria yang dimaksud yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen. Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

c. Indikator Kualitas Audit

Berdasarkan Draft Exposure Institut Akuntan Publik (2016), indikator kualitas audit antara lain :

a. Kompetensi Auditor

Kompetensi auditor merupakan kemampuan profesional individu auditor dalam menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan suatu perikatan, baik secara bersama-sama dalam

suatu tim atau secara mandiri berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku. Kompetensi auditor diperoleh dari perguruan tinggi dalam bidang akuntansi, kegiatan pengembangan, dan pelatihan profesional di tempat kerja. Auditor juga harus meningkatkan kompetensi melalui kegiatan pelatihan berkelanjutan.

b. Penggunaan Standar Perikatan Audit

Standar Perikatan Audit (SPA) 300 mengenai Perencanaan Suatu Audit atas Laporan Keuangan yang mengatur beberapa ketentuan, antara lain :

1) Keterlibatan Anggota Tim Perikatan Utama

Rekan perikatan dan anggota tim perikatan lainnya harus dilibatkan dalam perencanaan audit, termasuk merencanakan dan berpartisipasi dalam diskusi diantara anggota tim perikatan.

2) Aktivitas Awal Perikatan

Auditor harus melakukan aktivitas-aktivitas berikut ini pada awal perikatan audit :

- a. Melakukan prosedur yang dipersyaratkan oleh SPA 220 tentang keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan audit tertentu.
- b. Mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan etika yang relevan, termasuk independensi sesuai dengan SPA 220.
- c. Menetapkan suatu pemahaman atas persyaratan perikatan seperti yang ditentukan oleh SPA 210 mengenai persetujuan syarat-syarat perikatan audit.

3) Aktivitas Perencanaan

Auditor harus menetapkan strategi audit secara keseluruhan yang menetapkan ruang lingkup, waktu, dan arah audit, serta memberikan panduan bagi pengembangan rencana

audit. Dalam hal menetapkan strategi audit secara keseluruhan, auditor harus mengidentifikasi karakteristik perikatan, memastikan tujuan pelaporan perikatan, mempertimbangkan faktor-faktor yang signifikan yang mengarah pada usaha tim perikatan, mempertimbangkan hasil aktivitas awal perikatan, dan memastikan sifat, waktu, serta luas sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan perikatan.

Dalam hal mengembangkan suatu rencana audit, auditor harus mencakup hal – hal sebagai berikut :

- Sifat, waktu dan luas prosedur penilaian risiko yang direncanakan, seperti ditentukan dalam SPA 315 mengenai pengidentifikasian dan penilaian risiko salah saji material melalui pemahaman tentang entitas dan lingkungannya.
- Sifat, waktu dan luas prosedur audit lanjutan pada tingkat asersi yang direncanakan, seperti ditentukan dalam SPA 330 mengenai respon auditor terhadap risiko yang ditentukan
- Prosedur audit lainnya yang direncanakan harus dilakukan agar perikatan tersebut memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh SPA.

4) Dokumentasi

Dalam hal dokumentasi, auditor harus memasukkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Strategi audit secara keseluruhan
- b. Rencana audit
- c. Setiap perubahan signifikan yang dilakukan selama perikatan audit terhadap strategi audit atau rencana audit secara keseluruhan dan alasan atas perubahan tersebut.

5) Pertimbangan Tambahan dalam Perikatan Audit Tahun Pertama

Sebelum melakukan audit tahun pertama, auditor harus melakukan aktivitas sebagai berikut :

- 1) Melakukan prosedur yang disyaratkan oleh SPA 220 tentang penerimaan hubungan dengan klien dan perikatan audit tertentu.
- 2) Melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu, jika terjadi pergantian auditor untuk mematuhi ketentuan etika yang relevan.

c. Sistem Pengendalian Mutu (SPM) Perikatan

Kantor Akuntan Publik (KAP) bertanggung jawab untuk menetapkan dan melaksanakan sistem pengendalian mutu dalam setiap perikatan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa KAP telah menetapkan kebijakan dan prosedur yang memungkinkan setiap personil dan KAP mematuhi ketentuan persyaratan Standar Profesi Akuntan Publik, Kode Etik dan ketentuan peraturan yang berlaku dalam melaksanakan setiap perikatan, serta laporan keuangan yang diterbitkan telah sesuai dengan kondisinya. Pengendalian mutu perikatan ini mencakup panduan dan dokumentasi yang memadai, kebijakan penelaahan dan supervisi, perumusan opini auditor, penyusunan laporan keuangan dan laporan auditor independen, dan penempatan pencantuman identitas Kantor Akuntan Publik (KAP) beserta Akuntan Publik (AP).

2.2.3. Akuntabilitas Auditor

a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas secara umum diartikan sebagai pertanggungjawaban atas semua tanggung jawab yang

diterimanya. Menurut Abdilah (2016), akuntabilitas adalah sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.

Menurut Kusuma (2014) dalam penelitian Abdilah (2016), menyebutkan bahwa akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kerjanya.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas kegiatan suatu organisasi yang berorientasi terhadap hasil dan kinerjanya serta manfaat yang diperoleh.

Prinsip-prinsip akuntabilitas menurut Mardiasmo (2006) dalam Yunita dan Chitianingrum (2018) antara lain :

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan organisasi yang memiliki nilai akuntabel.
2. Merupakan sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh organisasi.
5. Bersikap jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan laporan akuntabilitas.

Dari beberapa prinsip di atas, akuntabilitas memiliki beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai alat kontrol tugas, di mana prinsip akuntabilitas merupakan media kontrol berjalannya tugas dan program yang telah dilakukan oleh atasan dan bawahan dan dijadikan tolok ukur keberhasilan pemimpin dalam masa jabatannya. Yang kedua adalah untuk menekan angka penyalahgunaan tugas, dengan adanya prinsip akuntabilitas baik pemimpin maupun bawahannya akan berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan pekerjaannya karena semua pekerjaan pada akhirnya akan diminta pertanggungjawabannya. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja, prinsip akuntabilitas membantu organisasi/ perusahaan untuk mengetahui apa yang sedang dibutuhkan stakeholder dan masyarakat. Seperti laporan keuangan, laporan keuangan sebagai salah satu alat untuk menilai akuntabilitas bisnis kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Akuntabilitas terdiri dari 2 jenis, yaitu :

a. Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal adalah sebuah kondisi di mana seseorang mampu mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil kepada jabatan otoritas di atasnya.

b. Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas horizontal adalah tanggung jawab organisasi terhadap masyarakat dan lingkungan eksternalnya yang tidak ada hubungan antara atasan dan bawahan., biasanya berhubungan erat dengan penyelesaian tugas pada pelayanan publik.

Dalam hal audit, akuntabilitas auditor berkaitan dengan tanggung jawab auditor dalam mendeteksi dan melaporkan kecurangan (*fraud*), kekeliruan, dan ketidakberesan, tanggung jawab mempertahankan sikap independensi dan menghindari konflik, tanggung jawab mengkomunikasikan informasi yang berguna tentang sifat dan hasil

proses audit, serta tanggung jawab menemukan tindakan melanggar hukum dari klien.

Beberapa penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa kualitas audit seorang auditor dipengaruhi oleh akuntabilitas dalam menyelesaikan proses auditnya. Dengan demikian, akuntabilitas merupakan salah satu faktor yang penting dalam diri auditor dalam melaksanakan proses auditnya.

b. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas

Menurut Burhanudin (2016) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas seseorang antara lain :

1. Latar belakang, seperti usia, jenis kelamin, suku, status sosial ekonomi, suasana hati, sifat kepribadian, dan pengetahuan mempengaruhi sikap dan perilaku individu terhadap suatu hal.
2. Keyakinan perilaku, yaitu hal-hal yang diyakini individu mengenai sebuah perilaku dari segi positif dan negatif, sikap terhadap perilaku atau kecenderungan untuk bereaksi efektif terhadap suatu perilaku, dalam bentuk suka atau tidak suka pada perilaku tersebut.
3. Keyakinan normatif, berkaitan dengan pengaruh lingkungan faktor lingkungan sosial khususnya orang-orang yang berpengaruh bagi kehidupan dapat mempengaruhi keputusan individu.
4. Norma subjektif, yaitu sejauh mana seseorang memiliki motivasi untuk mengikuti pandangan orang terhadap perilaku yang akan dilakukan.
5. Keyakinan bahwa suatu perilaku dapat dilaksanakan diperoleh dari berbagai hal, pertama adalah pengalaman melakukan perilaku yang sama sebelumnya atau pengalaman yang diperoleh karena melihat orang lain melaksanakan perilaku tersebut sehingga ia memiliki keyakinan bahwa ia pun akan melaksanakannya.

6. Perilaku kemampuan mengontrol, yaitu keyakinan bahwa individu pernah melaksanakan atau tidak pernah melaksanakan perilaku tertentu, individu memiliki fasilitas dan waktu untuk melakukan perilaku tersebut, kemudian individu melakukan estimasi atas kemampuan dirinya apakah dia punya kemampuan atau tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan perilaku tersebut.

c. Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas auditor diukur dengan indikator sebagai berikut :

a. Tercapainya Visi dan Misi Kantor Akuntan Publik

Visi dan misi adalah hal yang harus disusun oleh setiap organisasi atau perusahaan agar memiliki tujuan yang selaras di dalam manajemen. Visi diartikan sebagai gambaran yang berorientasi ke depan atau sebagai karakteristik dan gambaran akan situasi mengenai ke arah mana tujuan selanjutnya. Di dalam lingkungan Kantor Akuntan Publik, visi biasanya merujuk ke arah profesional, pengetahuan, tanggung jawab dan kepercayaan akuntan publik, auditor, beserta semua stafnya. Sedangkan misi diartikan sebagai cara agar visi yang telah disusun dapat tercapai sesuai dengan tujuan organisasi atau perusahaan. Di dalam lingkungan Kantor Akuntan Publik, misi biasanya terkait dengan peningkatan kompetensi auditor, pengoptimalan sumber daya manusia, dan kerjasama bisnis dengan memaksimalkan manfaat dari jasa audit dan asurans.

Kantor Akuntan Publik selalu berupaya memberikan pelayanan jasa terbaik mereka agar visi dan misi dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Dengan tercapainya visi dan misi tersebut, akan membuat citra integritas dan akuntabilitas kantor akuntan publik di mata masyarakat semakin membaik sehingga tingkat kepercayaan publik terhadap jasa mereka juga semakin membaik.

b. Pertanggungjawaban Auditor

Berkaitan dengan audit, sebagai seorang auditor akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan audit yang dihasilkan. Bentuk pertanggungjawaban auditor meliputi (Suhayati dan Bramasto, 2012) :

1. Keyakinan yang Memadai (*Reasonable Assurance*)

Terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan terbebas dari salah saji material. Laporan auditor yang berisi tentang pendapat auditor atas laporan keuangan didasarkan pada konsep pemerolehan keyakinan memadai, namun suatu audit tidak memberikan jaminan atas akurasi laporan keuangan.

2. Terhadap Fraud dan Illegal Acts

Terkait dengan penggunaan profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Salah saji dapat terjadi sebagai akibat dari kekeliruan maupun kecurangan. Fraud diartikan sebagai suatu tindakan yang disengaja oleh satu atau lebih individu dalam manajemen atau pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan secara tidak adil dan melanggar hukum. Kecurangan (*Fraud*) lebih sulit dideteksi auditor dibandingkan dengan kekeliruan (*Error*) karena fraud biasanya berkaitan dengan unsur kolusi dan pemalsuan dokumen.

Illegal Client Acts merupakan tindakan melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Dalam hal ini auditor harus menentukan apakah suatu tindakan klien dapat dipandang sebagai pelanggaran hukum dan auditor harus mendeteksi dan melaporkan salah saji akibat tindakan melanggar

hukum yang berdampak langsung dan material terhadap angka-angka yang tersaji dalam laporan keuangan.

3. Masalah Going Concern

Kelangsungan hidup entitas dipakai sebagai asumsi dalam pelaporan keuangan sepanjang tidak terbukti adanya informasi yang menunjukkan hal yang berlawanan. Auditor harus mengevaluasi apakah terdapat kesangsian yang cukup signifikan mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas dengan cara mempertimbangkan apakah hasil prosedur yang dilaksanakan dalam perencanaan dan pengumpulan bukti audit. Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian maka auditor harus memperoleh informasi mengenai rencana manajemen dan melakukan evaluasi terhadap rencana tersebut, dan menentukan apakah kemungkinan bahwa rencana tersebut dapat secara efektif diberlakukan.

4. Laporan Auditor Independen

Auditor menyajikan laporan auditor independen dengan beberapa pendapat, seperti Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan, Tidak Wajar, dan Tidak Menyatakan Pendapat.

c. Sanksi dan Standard Operating Procedure (SOP)

Sanksi adalah tindakan – tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan auditor, sanksi yang akan diterima apabila terbukti melakukan pelanggaran antara lain :

1) Sanksi Administratif dari Menteri Keuangan

Pengawasan atas profesi akuntan publik merupakan ranah kewenangan Menteri Keuangan yang salah satunya bermuara dalam bentuk pemberian sanksi administratif. Pelanggaran administratif antara lain pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis klien, telat mengajukan perpanjangan izin, pendirian dan pengelolaan KAP dan cabang yang tidak benar, atau mempekerjakan tenaga asing tidak sesuai aturan. Bentuk sanksi administratif berupa rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu, peringatan tertulis, pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu, pembatasan pemberian jasa tertentu, pembekuan izin, pencabutan izin, dan denda administratif.

2) Sanksi Administratif dari Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan salah satu lembaga pengawas di sektor jasa keuangan yang melakukan pengawasan terhadap akuntan publik yang bergerak di bidang sektor keuangan.

Bentuk pelanggaran yang dianggap melanggar ketentuan OJK antara lain melakukan pelanggaran terhadap peraturan OJK itu sendiri, menunjuk KAP atau akuntan publik tanpa mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, atau usulan Dewan Komisaris dalam penunjukan KAP atau akuntan publik tidak memperhatikan rekomendasi Komite Audit, keterlambatan penyerahan laporan, tidak memenuhi persyaratan dari OJK, tidak memenuhi jumlah SKP PPL, tidak memenuhi kondisi independen, dan tidak menyampaikan laporan dengan benar.

Sanksi administratif yang diberikan kepada akuntan publik berupa teguran dan peringatan tertulis, denda, pembekuan pendaftaran, dan pembatalan pendaftaran. OJK dapat memberikan pembekuan pendaftaran untuk jangka waktu satu

tahun. Namun, OJK dengan pertimbangan tertentu dapat langsung memberikan sanksi pembatalan pendaftaran, tanpa melakukan pembekuan pendaftaran terlebih dahulu atau masa pembekuan belum satu tahun. Pembekuan pendaftaran atau pembatalan pendaftaran membuat akuntan publik tak bisa berpraktek di sektor Jasa Keuangan.

3) Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dapat diberikan adalah dalam bentuk pidana penjara atau denda. Proses pemberian sanksi pidana melibatkan pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan pihak-pihak lainnya.

Sanksi pidana dapat diberikan dalam hal: akuntan publik melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, memalsukan data, sengaja menghilangkan catatan atau kertas kerja, menjadi pihak terasosiasi dalam kejahatan yang disebutkan sebelumnya, atau memberikan keterangan atau dokumen palsu untuk memperpanjang izin akuntan publik.

Sementara Standard Operating Procedure (SOP) adalah suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja bagi entitas, berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Dalam hal akuntansi dan audit, SOP berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut :

a) Pengukuran atau Penilaian

Pengukuran (*measurement*) atau penilaian (*valuation*) dalam hal ini adalah penentuan jumlah mata uang rupiah yang harus dicatat dalam suatu transaksi. SOP digunakan sebagai dasar pedoman pengukuran dalam menentukan berapa jumlah rupiah yang harus diperhitungkan dan dicatat dalam suatu transaksi.

b) Definisi Elemen pada Laporan

SOP memberikan batasan pengertian istilah atau nama-nama yang digunakan dalam laporan keuangan agar tidak terjadi kesalahan penempatan akun oleh penyusun dan kesalahan interpretasi oleh pemakai laporan. Elemen dalam laporan keuangan terdiri dari aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Dengan batasan tersebut setiap transaksi dimasukkan ke dalam elemen dan akun yang tepat.

c) Pengungkapan atau Penyajian

Pengungkapan berkaitan dengan bagaimana suatu informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan. Segala informasi yang tersaji harus berdasarkan dokumentasi yang ada di lapangan. Dengan demikian, laporan yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan SOP yang sudah dijalankan.

2.2.4. Independensi Auditor

a. Pengertian Independensi

Menurut Mulyadi (2011), Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Independensi menurut Islahuzzaman (2012) yaitu auditor yang independen adalah auditor yang tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam audit. Independensi lebih banyak ditentukan faktor luar diri auditor.

Dalam Dewan Standard Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui SPAP (2011:220.1) menyatakan bahwa auditor diharuskan bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan didalam hal ia berpraktik sebagai auditor intern). Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingann siapapun sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa independensi adalah sikap yang terdapat pada diri auditor yang bebas dari pengaruh dan tekanan dari dalam maupun luar ketika mengambil suatu keputusan, di mana dalam pengambilan keputusan tersebut harus berdasarkan fakta yang ada dan secara objektif.

Menurut Arens et.al (2015), menyebutkan bahwa independensi terdiri dari dua komponen, yaitu :

- a. Independensi dalam berpikir (*independence in mind*), yang mencerminkan pikiran auditor yang memungkinkan audit dilaksanakan dengan sikap yang tidak bias. Independensi dalam berpikir mencerminkan persyaratan lama bahwa anggota harus independen dalam fakta.
- b. Independensi dalam penampilan (*independence in appearance*), yaitu independen yang dipandang dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang diaudit yang mengetahui hubungan antara auditor dengan klianya atau interpretasi lain atas independensi ini.

Kepercayaan publik mengenai independensi auditor sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik. Menurut Fazrin (2016) independensi dianggap penting bagi profesi akuntan publik, karena :

- i) Merupakan dasar bagi akuntan publik untuk merumuskan dan menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa. Dengan demikian, laporan keuangan yang telah diperiksa tersebut akan menambah kredibilitasnya dan dapat diandalkan bagi pemakai laporan keuangan dan pihak berkepentingan lainnya.
- ii) Profesi akuntan publik merupakan profesi yang memegang kepercayaan dari masyarakat, sehingga apabila terjadi masalah pada independensi maka kepercayaan masyarakat akan turun bahkan akan hilang.

Dengan demikian, dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang auditor, selain memiliki pengetahuan, keahlian, dan kompetensi yang tinggi, juga harus bersikap independen karena berkaitan dengan informasi yang disajikan dan digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan Draft Exposure Institut Akuntan Publik (2016), kepatuhan Kantor Akuntan Publik terhadap ketentuan independensi antara lain :

- i) KAP memiliki panduan independensi yang berlaku bagi setiap personil, KAP, dan Jaringan KAP
- ii) KAP telah menunjuk partner yang bertanggung jawab atas kepatuhan independensi
- iii) Setiap auditor telah mengikuti pelatihan mengenai independensi yang berlaku, telah menerapkan ketentuan independensi pada setiap perikatan secara tepat, dan menyampaikan deklarasi kepatuhan terhadap ketentuan independensi yang berlaku.
- iv) Rotasi terhadap peronil kunci perikatan telah dilakukan secara tepat
- v) Pernyataan independensi ditandatangani oleh seluruh anggota tim perikatan.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Independensi

Menurut Gina Gania (2015) dalam penelitian Fazrin (2016), faktor-faktor yang mempengaruhi independensi auditor adalah sebagai berikut.

a. Lama Hubungan Dengan Klien (Audit Tenure)

Berdasarkan POJK 13/2017 mengenai Penggunaan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan memberikan batasan pada penggunaan jasa audit tahunan oleh akuntan publik yang sama paling lama selama 3 tahun buku secara berturut-turut dan berlaku juga untuk akuntan publik yang merupakan pihak terasosiasi. Pembatasan ini dilakukan agar pihak auditor dan klien tidak memiliki hubungan yang dapat menyebabkan independensi terganggu, karena semakin lama hubungan auditor dengan klien maka akan menimbulkan rasa empati yang berlebih.

b. Tekanan dari Klien

Konflik kepentingan menjadi salah satu penyebab dari tekanan klien di mana auditor dan klien tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan auditor. Pihak klien biasanya menginginkan hasil audit yang terlihat baik namun berdasarkan hasil audit yang ditemukan hal-hal yang sebaliknya. Dalam situasi ini, auditor merasa dilema karena apabila mengikuti keinginan klien maka dia melanggar standar profesi akuntan publik, kode etik, dan standar keuangan lainnya, namun disisi lain apabila tidak memenuhi keinginan klien maka auditor akan kehilangan kliennya. Hal ini lah yang dapat mengganggu independensi dari auditor, bahkan ada sebagian auditor yang lebih rela kehilangan klien daripada mendapat sanksi dari regulator yang mengatur tentang akuntan publik dan kantor akuntan publik.

Untuk itu dalam melaksanakan auditnya, auditor harus bisa menghindari konflik kepentingan agar independensi tetap terjaga.

c. Telaah dari Rekan Auditor

Telaah dari rekan auditor dimaksudkan agar kantor akuntan publik tetap menaati sistem pengendalian mutu dengan melaporkan kantor akuntan publik yang ditelaah apakah sudah mengembangkan dan mengimplementasi kebijakan dan prosedur yang telah disusun. Telaah dari rekan auditor juga menjadi dasar penilaian yang objektif karena dapat menjaga independensi dan kualitas audit yang baik.

c. Indikator Independensi

Menurut Arens et.al (2015), menyebutkan indikator independensi auditor antara lain :

a. Tanda Tangan Surat Pernyataan Independensi

Sebelum memulai pelaksanaan audit, auditor membuat dan menandatangani surat pernyataan independensi yang kemudian diserahkan kepada klien yang akan diaudit. Dalam surat pernyataan independensi, auditor menyatakan bahwa dalam pelaksanaan audit akan menaati kebijakan dan peraturan KAP di mana dia bekerja, menaati persyaratan etika yang ditetapkan oleh KAP dan semua regulator yang terkait, menjaga kerahasiaan semua data dan informasi menyangkut klien dan KAP, tidak memiliki konflik kepentingan dalam audit, objektif dan profesional, serta tidak ada intervensi dari pihak manapun.

b. Jasa Akuntansi dan Jasa Lainnya Selain Audit dengan Klien

Pemberian jasa akuntansi dan jasa lainnya ini seperti akuntan publik yang mencatat transaksi ke dalam jurnal klien, kemudian mempostingnya ke buku besar, membuat jurnal

penyesuaian, dan kemudian baru melakukan audit tentunya sering terjadi pertanyaan seperti apakah akuntan publik dapat independen dalam memainkan peran auditnya. Ada beberapa syarat penting yang harus dipenuhi auditor sebelum memberikan jasa pembukuan dan audit, antara lain klien harus bertanggung jawab penuh atas laporan keuangan, akuntan publik tidak boleh berperan sebagai karyawan atau manajemen yang mengoperasikan perusahaan, dan dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan yang disusun dari pembukuan dan catatan yang telah disiapkan harus sesuai dengan GAAS (Generally Accepted Auditing Standards).

c. Mantan Pejabat Klien dan Ada Hubungan dengan Klien

Jika seorang akuntan publik adalah mantan anggota dari dewan direksi atau pejabat perusahaan klien maka kemampuannya untuk melakukan evaluasi yang independen atas kewajaran penyajian laporan keuangan akan terpengaruh. Hal ini dikarenakan keterlibatan yang cukup sering dengan manajemen dan keputusan yang dibuatnya cenderung mempengaruhi pandangan para pemakai laporan keuangan terhadap independensinya sebagai akuntan publik. Dengan demikian, tidak memperkenankan anggota yang terlibat, partner, dan staf profesional di kantor partner yang bertanggung jawab atas penugasan audit menjadi direktur atau pejabat pada perusahaan yang menjadi klien audit.

Hubungan kekerabatan ini mencakup orang tua, kakak atau adik, serta anak yang telah hidup mandiri. Bagi orang yang terlibat dalam tim penugasan, independensi akan terganggu bila seorang keluarga dekat menduduki posisi kunci pada klien atau memiliki kepentingan keuangan yang material yang memungkinkan mempengaruhi fungsi akuntansi, penyiapan laporan keuangan, atau isi dari laporan keuangan.

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

Kompleksitas pekerjaan audit yang tinggi menuntut rasa tanggung jawab yang tinggi. Akuntabilitas disini sebagai rasa kebertanggungjawaban yang dimiliki oleh auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit juga semakin tinggi. Semakin tinggi akuntabilitas yang dimiliki oleh auditor maka bisa dipastikan kualitas audit yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan sehingga laporan keuangan yang diaudit dan laporan hasil audit yang dihasilkan memberikan kepercayaan dan keandalan bagi pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan.

2.3.1. Hubungan Akuntabilitas dengan Kualitas Audit

Akuntabilitas diartikan sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas kegiatan suatu organisasi yang berorientasi terhadap hasil dan kinerjanya serta manfaat yang diperolehnya. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan et.al (2018), Vidyantari, Suputra (2018), dan Nainggolan (2016) memberikan bukti empiris bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini berarti semakin tinggi rasa kebertanggungjawaban seorang auditor maka akan meningkatkan kualitas audit dalam melakukan pemeriksaan.

2.3.2. Hubungan Independensi dengan Kualitas Audit

Independensi auditor diartikan sebagai sikap bebas yang tidak memihak kepada siapapun, auditor yang memiliki sikap independen yang tinggi tentu akan berani untuk membuat laporan keuangan audit yang sesuai dengan apa yang auditor temukan dalam proses audit. Sebelum menerima perikatan audit, Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik harus membuat Surat Pernyataan Independensi terhadap audit klien di atas materai. Sehingga apabila KAP dan AP tidak independen maka tidak dapat menerima perikatan audit.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Falatah (2018), dan Geovani dan Rosyada (2019) yang memberi bukti empiris bahwa independensi

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Dengan demikian, semakin tinggi independensi auditor maka akan semakin berkualitas pekerjaan yang mereka lakukan sehingga kualitas audit yang mereka hasilkan semakin baik.

2.4. Pengembangan Hipotesis

Menurut Dr. Nur Indriantoro dan Drs. Bambang Supomo dalam buku *Metedologi Penelitian Bisnis* (2014), hipotesis menyatakan hubungan yang diduga logis antara dua variabel atau lebih dalam rumusan proporsisi yang dapat diuji secara empiris. Hipotesis digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian dan pemecahannya secara rasional, menyatakan variabel-variabel penelitian yang perlu diuji secara empiris, digunakan sebagai pedoman untuk memilih metode-metode pengujian data, dan menjadi dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. Perumusan hipotesis juga memperhatikan beberapa kriteria seperti berupa pernyataan yang mengarah pada tujuan penelitian, berupa pernyataan yang dirumuskan dengan maksud untuk dapat diuji secara empiris, dan berupa pernyataan yang dikembangkan berdasarkan teori-teori yang lebih kuat.

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, teori, dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

- H₁ : Terdapat pengaruh positif dan signifikan akuntabilitas auditor terhadap kualitas audit
- H₂ : Terdapat pengaruh positif dan signifikan independensi auditor terhadap kualitas audit

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.5.

Kerangka Konseptual Penelitian

